

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



**Highlight Penekanan Sasaran dan Lokasi (Daerah)
dalam RKP 2018**

PRIORITAS NASIONAL 7: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Disampaikan oleh:

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jakarta, 13 Januari 2017

CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN 2018

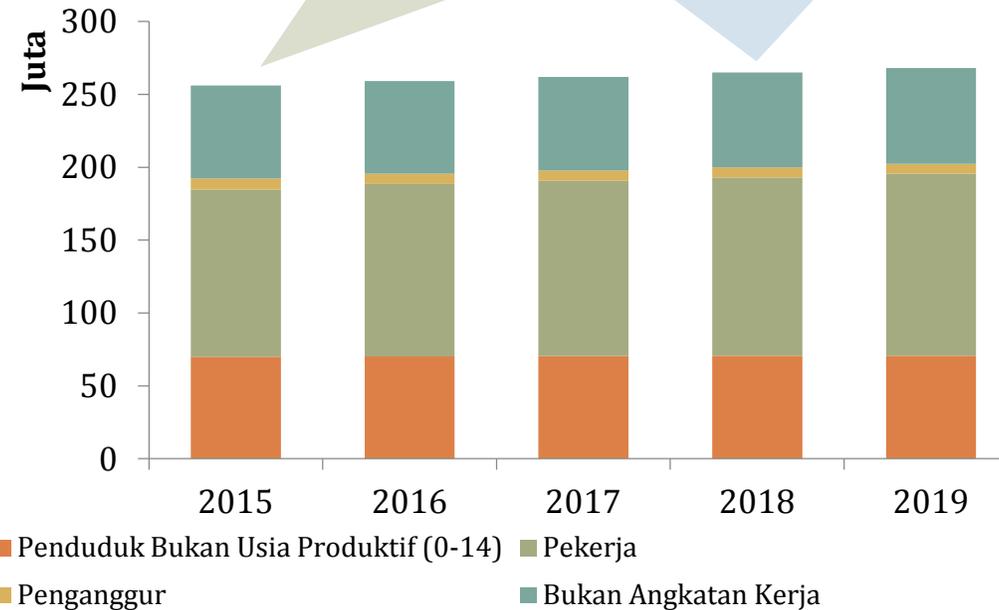
TAHUN 2016

Jumlah penduduk miskin
sekitar 27,8 juta jiwa
(Sumber: BPS, September 2016)

Jumlah penduduk berdasarkan
SUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan
proyeksi = 265,02 juta jiwa

TAHUN 2018



Penduduk Bukan Usia
Produktif (0-14): 70,5 juta



Penduduk Usia
Produktif (15+):
194,5 juta



Angkatan Kerja:
129,4 juta



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) diperkirakan 67%

TARGET PEMBANGUNAN 2018

- Target tingkat kemiskinan: 9-10%
- Target tingkat pengangguran terbuka: 5,3-5,5%
- Target rasio gini: 0,38

Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun

CAPAIAN DAN TANTANGAN PRIORITAS NASIONAL: SEKITAR 66% KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA BERHASIL MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN

Beberapa kabupaten di kategori 4 membutuhkan perhatian khusus karena tingkat kemiskinannya yang meningkat dan masih di atas rata-rata tingkat nasional, diantaranya:

1. Kab. Bulungan
2. Kab. Keerom
3. Kab. Manokwari
4. Kab. Teluk Bintuni
5. Kota Gunungsitoli
6. Kab. Musi Rawas
7. Kab. Fakfak

Keterangan:

Kategori perkembangan tingkat kemiskinan Kab./Kota periode Maret 2014-2015

Terdapat 14 Kab./Kota baru di tahun 2015 hasil pemekaran yang tidak masuk kategori

Kategori 1

Tingkat kemiskinan kab./kota menurun.

Tingkat kemiskinan kab./kota tahun 2015 sudah dibawah tingkat kemiskinan nasional ($\leq 11.22\%$)

173 kab./kota

Kategori 2

Tingkat kemiskinan kab./kota menurun.

Tingkat kemiskinan kab./kota tahun 2015 masih di atas tingkat kemiskinan nasional ($> 11.22\%$)

165 kab./kota

Kategori 4

Tingkat kemiskinan kab./kota meningkat.

Tingkat kemiskinan kab./kota tahun 2015 masih di atas tingkat kemiskinan nasional ($> 11.22\%$)

77 kab./kota

Kategori 3

Tingkat kemiskinan kab./kota meningkat.

Tingkat kemiskinan kab./kota tahun 2015 sudah dibawah tingkat kemiskinan nasional ($\leq 11.22\%$)

82 kab./kota

KONSENTRASI PENDUDUK MISKIN SEBAGIAN BESAR PROVINSI BERADA DI KAWASAN PERDESAAN

Hampir di semua provinsi tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan lebih tinggi dari perkotaan
Isu kemiskinan perkotaan terlihat di Provinsi Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DIY, Jawa Tengah, NTB, NTT dan Sulawesi Tengah



ARAH KEBIJAKAN RKP 2018

PN 7: PENANGGULANGAN KEMISKINAN



HIGHLIGHT KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran



PKH bagi 6 juta
Keluarga Termiskin

Bantuan pendidikan bagi
19.7 juta anak usia sekolah
bagi keluarga sangat miskin
dan miskin



Rastra/Bantuan Pangan
Non-Tunai bagi keluarga
sangat miskin, miskin
dan rentan

Bantuan iuran kesehatan
bagi 94.4 juta penduduk
miskin dan rentan
(termasuk bayi baru lahir)



Subsidi energi bagi
masyarakat sangat
miskin, miskin dan rentan

Perluasan kepersetaan
Jaminan Kesehatan dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan



**Peyaluran bantuan sosial kartu
kombo untuk mendukung
inklusi keuangan**

Pemenuhan Kebutuhan Dasar



Percepatan kepemilikan
identitas hukum
(akta kelahiran, NIK)



Penyediaan infrastruktur
dasar: sanitasi, air minum,
jalan, jembatan



Terfasilitasinya akses
terhadap pelayanan
kesehatan untuk
mengurangi angka
stunting



Bantuan pembiayaan
KPR swadaya,
sejahtera tapak, dan
satu rumah susun



Penyediaan rumah
bagi masyarakat
berpenghasilan
rendah

**Penajaman target wilayah
(prioritas kantong-kantong
kemiskinan)**

Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

UMKM dan Koperasi sebagai penggerak
Ekonomi rakyat



Registrasi usaha skala mikro
dan kecil



Pengembangan sarana dan
prasarana usaha bagi UMKM



Fasilitasi sertifikasi,
standarisasi, merek, dan
pengemasan



Akses UMKM
untuk mendapat kredit



Perbaikan tata kelola dan
kelembagaan koperasi

**Mendorong usaha mikro dan
kecil "naik kelas"**

SASARAN PENURUNAN TARGET TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2015-2018

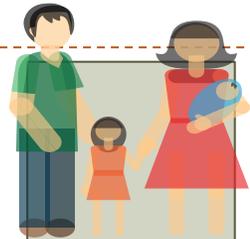
No	Provinsi	Tingkat Kemiskinan				Jumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 10% tahun 2015
		Realisasi*)		Proyeksi Target		
		2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	17,08	16,73	16,38	15,86	22
2	Sumatera Utara	10,53	10,35	9,62	9,18	23
3	Sumatera Barat	7,31	7,09	6,39	6,03	2
4	Riau	8,42	7,98	7,73	7,40	4
5	Jambi	8,86	8,41	7,97	7,57	4
6	Sumatera Selatan	14,25	13,54	13,16	12,81	16
7	Bengkulu	17,88	17,32	16,99	16,75	9
8	Lampung	14,35	14,29	13,27	12,84	13
9	Kep. Bangka Belitung	5,4	5,22	4,80	4,42	-
10	Kep. Riau	6,24	5,98	5,72	5,26	1
11	DKI Jakarta	3,93	3,75	3,50	3,23	1
12	Jawa Barat	9,53	8,95	8,68	8,32	14
13	Jawa Tengah	13,58	13,27	12,52	12,10	26
14	DI Yogyakarta	14,91	14,05	13,80	13,63	3
15	Jawa Timur	12,34	12,05	11,49	11,06	25
16	Banten	5,9	5,42	5,42	5,11	1
17	Bali	4,74	4,25	4,21	4,14	-

No	Provinsi	Tingkat Kemiskinan				Jumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 10% tahun 2015
		Realisasi*)		Proyeksi Target		
		2015	2016	2017	2018	
18	Nusa Tenggara Barat	17,1	16,48	15,85	15,34	9
19	Nusa Tenggara Timur	22,61	22,19	21,13	20,36	21
20	Kalimantan Barat	8,03	7,87	7,18	6,86	3
21	Kalimantan Tengah	5,94	5,66	5,32	5,14	-
22	Kalimantan Selatan	4,99	4,85	4,43	4,22	-
23	Kalimantan Timur	6,23	6,11	5,22	5,02	1
24	Kalimantan Utara	6,24	6,23	4,96	4,81	-
25	Sulawesi Utara	8,64	8,34	7,70	7,35	6
26	Sulawesi Tengah	14,66	14,45	13,34	12,87	11
27	Sulawesi Selatan	9,38	9,4	8,54	8,24	10
28	Sulawesi Tenggara	12,89	12,88	11,90	11,69	11
29	Gorontalo	18,32	17,72	17,00	16,50	5
30	Sulawesi Barat	12,39	11,74	10,98	10,60	3
31	Maluku	19,51	19,18	17,99	17,34	10
32	Maluku Utara	6,83	6,33	5,70	5,59	2
33	Papua Barat	25,83	25,43	23,56	22,44	12
34	Papua	28,16	28,54	27,10	26,82	30
	Indonesia	11,22	10,86	10,33	9,95	298

Keterangan: *) Realisasi angka kemiskinan bulan Maret

- Dari total 511 kab/kota di Indonesia, saat ini terdapat 298 kab/kota yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 10 persen.
- Berdasarkan hasil exercise proyeksi kemiskinan per provinsi untuk tahun 2017 dan 2018, tingkat kemiskinan secara nasional dapat mencapai target di tahun 2017 (10,5 persen) dan tahun 2018 (9,0-10,0 persen) dengan pertumbuhan ekonomi merata ke seluruh wilayah dan inflasi dapat ditekan sehingga seluruh provinsi dapat mencapai target yang diproyeksikan.

PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADU UNTUK PENETAPAN SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN



100%

Basis Data Terpadu (BDT) berisi data *by name by address* 40 persen penduduk berpendapatan terendah

40%

Subsidi energi diberikan kepada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan rentan

36%

Bantuan Iuran kesehatan diberikan kepada 36% penduduk sangat miskin, miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir)

25%

Bantuan Pendidikan diberikan kepada 25% penduduk yang memiliki anak usia sekolah dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin

13%

Rastra/Bantuan Pangan Non-Tunai diberikan kepada 25% penduduk dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin

PKH diberikan kepada 13% penduduk dari keluarga termiskin

CAKUPAN PROGRAM
BANTUAN/SUBSIDI

Penggunaan BDT Status Sosial Ekonomi Terendah

Kondisi Kesejahteraan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu
Rentan Miskin	6,9 Juta	7,4 Juta	32,2 Juta
Hampir Miskin	5,9 Juta	6,2 Juta	32,9 Juta
Miskin	6,4 Juta	6,8 Juta	8,7 Juta
Sangat Miskin	6,6 Juta	7,3 Juta	19,1 Juta
TOTAL	25,8 Juta	27,7 Juta	93,0 Juta*

Keterangan:

- * Belum seluruhnya mencakup daerah dengan kondisi geografis sulit seperti Provinsi Papua dan Papua Barat.
- * Saat ini sedang dikembangkan metode pendaftaran mandiri untuk melengkapi data tersebut *by name by address*.



KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN BERPENDAPATAN 40% TERBAWAH

Target dan Realisasi
Kepemilikan Akta Kelahiran
Penduduk Berpendapatan
40% Terbawah

2014

Baseline
68,16

2015

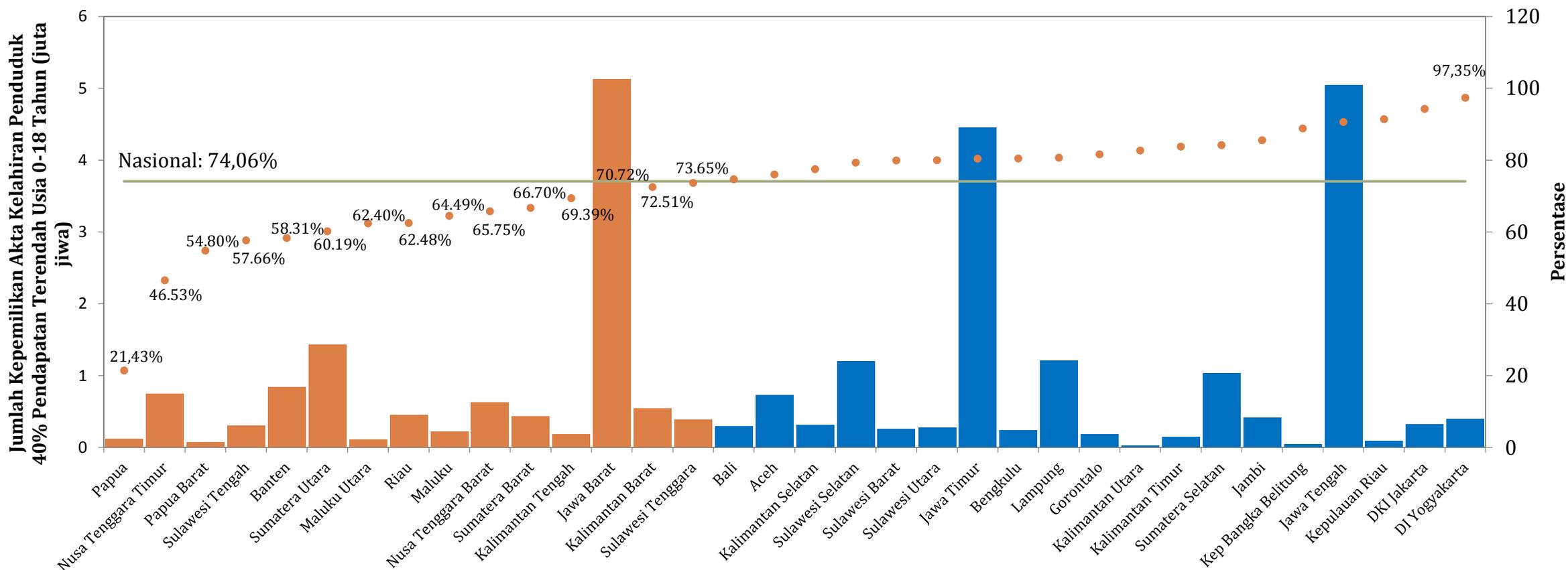
Target: 68,87*
Realisasi: 71,59**

2016

Target: 71,00*
Realisasi: 74,06**

2019

Target
77,40

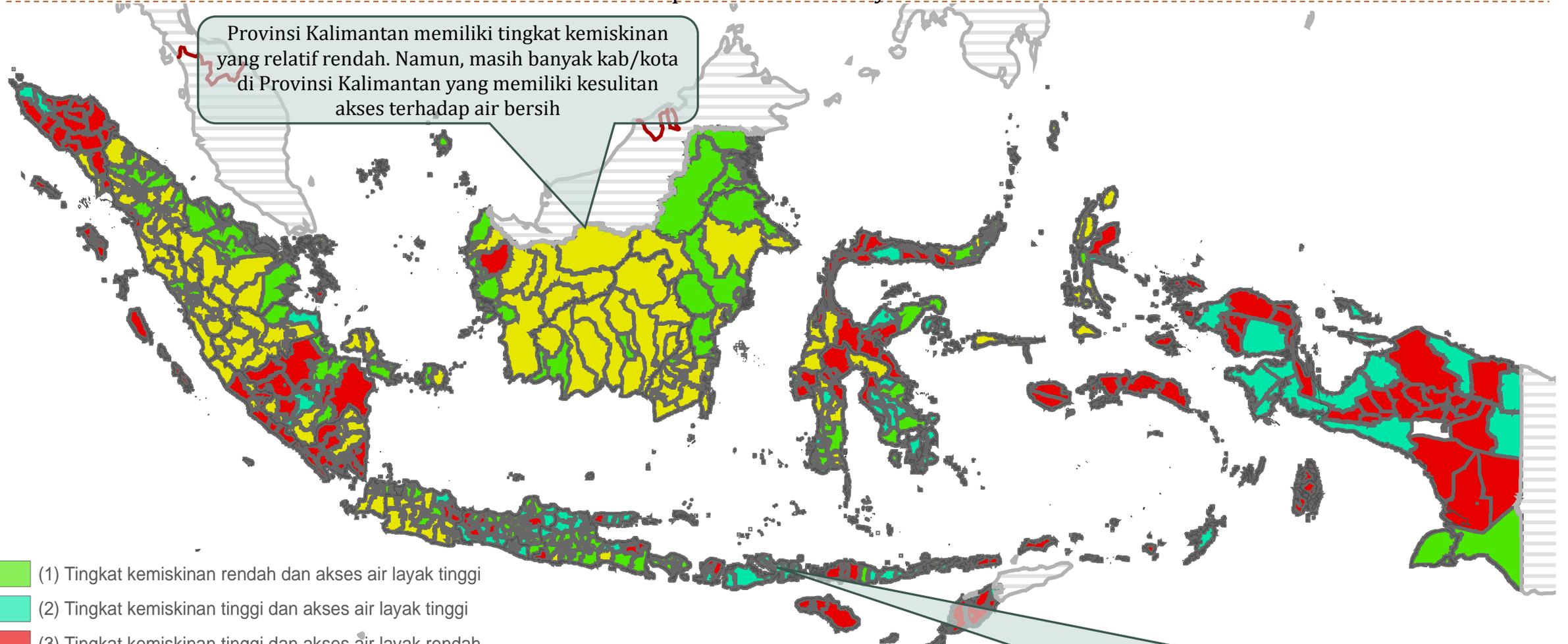


Catatan: *) Target ditetapkan berdasarkan intrapolasi linier *baseline* 2013 dan target 2019 dalam RPJMN 2015-2019

***) Data Susenas 2015-2016

CONTOH TINGKAT KEMISKINAN DAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN AIR LAYAK:

Terdapat 250 kab/kota di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi maupun provinsi dengan tingkat kemiskinan yang memiliki akses rendah terhadap kebutuhan air layak



Provinsi Kalimantan memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Namun, masih banyak kab/kota di Provinsi Kalimantan yang memiliki kesulitan akses terhadap air bersih

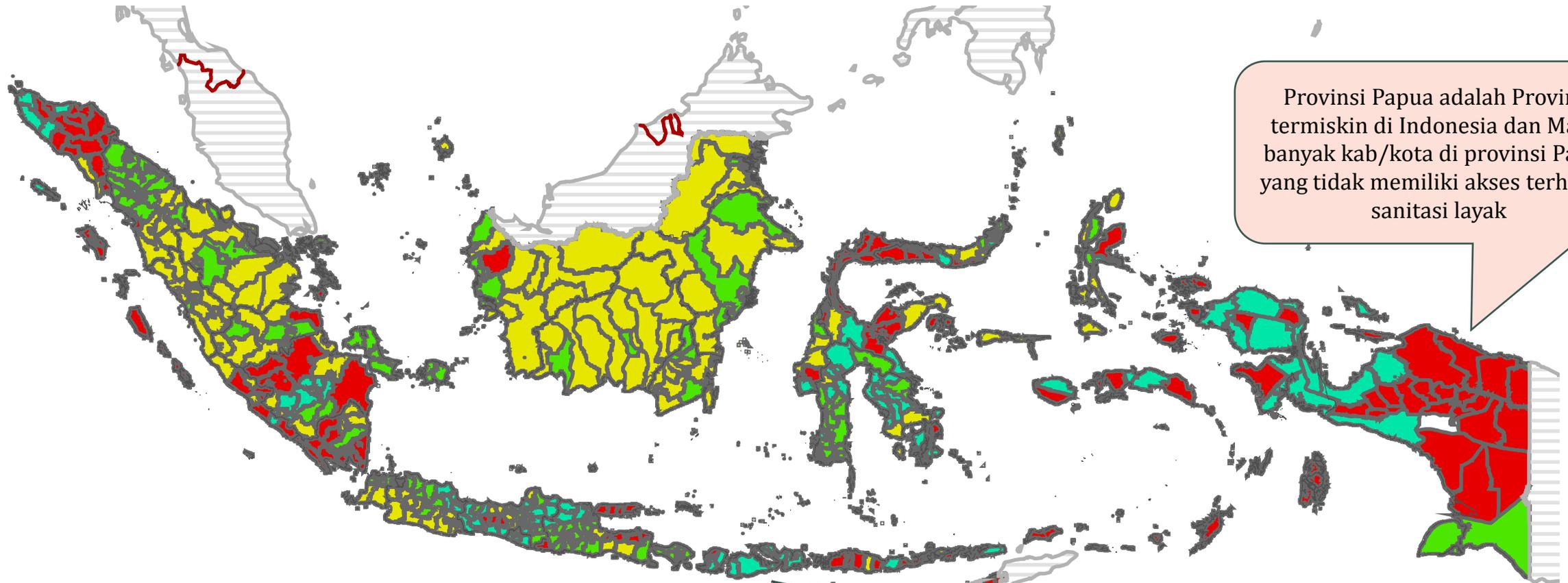
- (1) Tingkat kemiskinan rendah dan akses air layak tinggi
- (2) Tingkat kemiskinan tinggi dan akses air layak tinggi
- (3) Tingkat kemiskinan tinggi dan akses air layak rendah
- (4) Tingkat kemiskinan rendah dan akses air layak rendah

Keterangan;
Batas tingkat kemiskinan tinggi dan rendah adalah rata-rata kemiskinan seluruh kabupaten/kota
Batas akses sanitasi layak tinggi dan rendah adalah rata-rata akses sanitasi layak seluruh kabupaten/kota

Provinsi NTT adalah salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, namun dalam hal akses terhadap air layak Provinsi NTT sudah baik karena beberapa program air bersih diberikan di NTT.

TINGKAT KEMISKINAN DAN PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGGUNAKAN SANITASI LAYAK:

Terdapat 243 kab/kota di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi maupun provinsi dengan tingkat kemiskinan yang memiliki akses rendah terhadap kebutuhan sanitasi layak



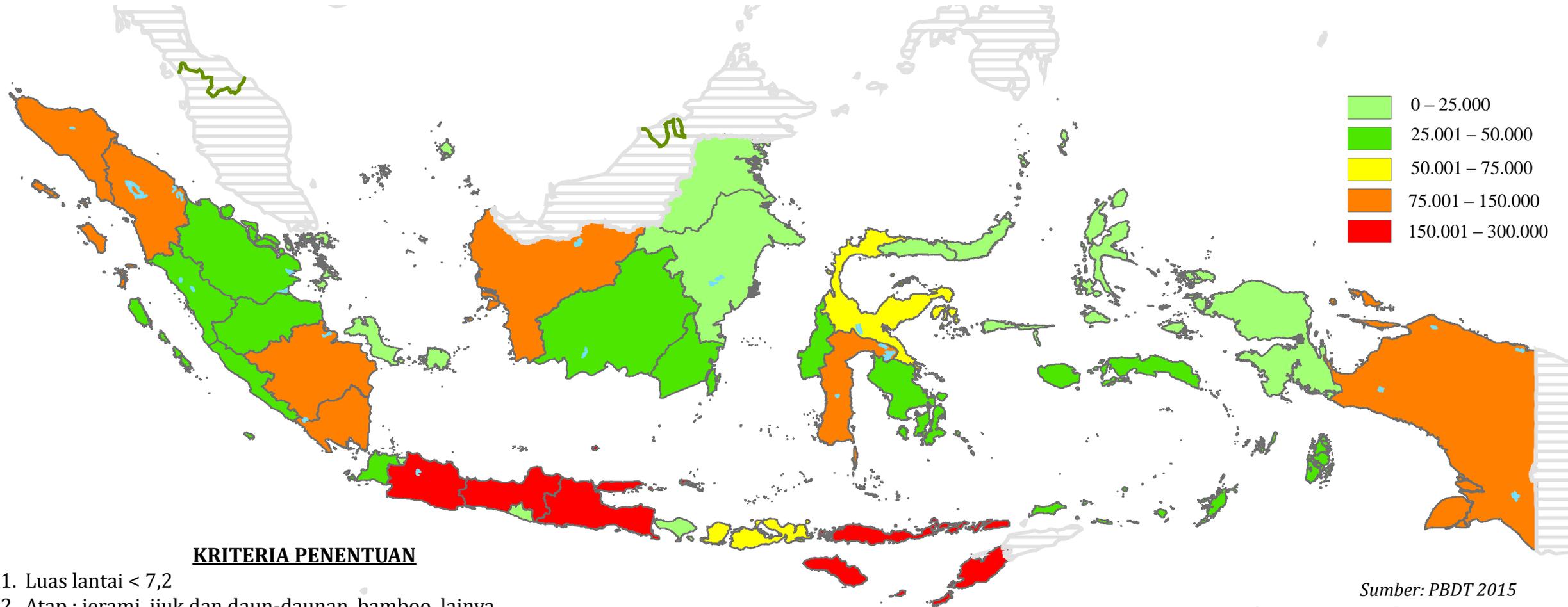
Provinsi Papua adalah Provinsi termiskin di Indonesia dan Masih banyak kab/kota di provinsi Papua yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi layak

-  (1) Tingkat kemiskinan rendah dan akses sanitasi layak tinggi
-  (2) Tingkat kemiskinan tinggi dan akses sanitasi layak tinggi
-  (3) Tingkat kemiskinan tinggi dan akses sanitasi layak rendah
-  (4) Tingkat kemiskinan rendah dan akses sanitasi layak rendah

Keterangan;
Batas tingkat kemiskinan tinggi dengan rendah adalah rata-rata kemiskinan seluruh kabupaten/kota
Batas akses sanitasi layak tinggi dengan rendah adalah rata-rata akses sanitasi layak seluruh kabupaten/kota

Provinsi NTT adalah salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, namun NTT sudah memiliki akses yang baik terhadap sanitasi yang layak

PERSEBARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) & RUMAH RAWAN LAYAK HUNI (RRLH) (25% penduduk berpendapatan terendah)



KRITERIA PENENTUAN

1. Luas lantai < 7,2
2. Atap ; jerami, ijuk dan daun-daunan, bamboo, lainnya
3. Dinding ; bambu, lainnya
4. Kriteria lantai ; tanah, lainnya
5. Kriteria sanitasi ; bersama, umum, tidak ada
6. Kriteria penerangan; bukan listrik
7. Kriteria air bersih; sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air sungai/danau/waduk, air hujan

- Jumlah RT yang memenuhi 3-7 kriteria (RTLH & RRLH) pada 25% penduduk berpendapatan terendah sebanyak 2.463.623 RT.
- Wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTT merupakan 4 daerah yang memiliki jumlah RTLH & RRLH terbesar (diatas 200 ribu RT)